



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KINERJA BAWASLU KABUPATEN KAMPAR DALAM MENCEGAH
PRAKTIK *MONEY POLITIC* MENURUT UNDANG-UNDANG NO.7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU
LEGISLATIF 2019 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH:

NANDA AYU MAHBUBAH

NIM: 11624204241

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan Judul **“Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Mencegah Praktik *Money Politic* Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Legislatif 2019 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nanda Ayu Mahbubah
Nim : 11624204241
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Oktober 2020

Pembimbing



Aprizal Ahmad, M.Sy
130112053

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *KINERJA BAWASLU KABUPATEN KAMPAR DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONEY POLITIC MENURUT UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH*, yang ditulis oleh :

Nama : **NANDA AYU MAHBUBAH**
 NIM : 11624204241
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 4 Januari 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Dalam jaringan (online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

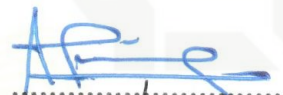


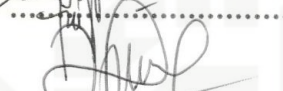
Pekanbaru, 4 Januari 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Basir, S.H.I., MH

Penguji I
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Penguji II
Haswir, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nanda Ayu Mahbubah (2020) : *Kinerja Bawaslu Kampar Dalam Mencegah Praktik Money Politic Menurut Uu No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Legislatif 2019 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.*

Penelitian dilatarbelakangi untuk mengungkap upaya Bawaslu kabupaten Kampar dalam mencegah praktik *money politic* pada pemilu legislatif 2019, yang menjadi tugas penting bagi Bawaslu Kabupaten Kampar, karena sebagai lembaga yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam melakukan pencegahan politik uang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Bawaslu Kampar dalam mencegah praktik *money politic* pada pemilu legislatif 2019, bagaimana efektivitas kinerja Bawaslu Kabupaten Kampar dalam mencegah praktik *money politic* menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pemilu legislatif 2019 dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap kinerja Bawaslu Kampar.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), yang berlokasi di Bawaslu kabupaten kampar. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 orang anggota Bawaslu Kabupaten Kampar, dengan menganbil 10 orang anggota Divisi Bawaslu Kabupaten Kampar sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. Data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah, *wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka*.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa upaya Bawaslu kampar dalam mencegah praktik politik uang belum sepenuhnya maksimal. Hal ini terbukti dengan adanya praktik *money politic* pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Kampar. Ada 15 (lima belas) laporan mengenai dugaan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu, dan 5 (lima) diantaranya adalah pelanggaran praktik *money politic*. Upaya yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah *money politic* dengan melakukan sosialisasi anti politik uang, pembentukan kelompok kerja, peningkatan partisipasi masyarakat. Dalam islam *money politic* diqiyaskan dengan *risywah*. Dalam hal ini, Bawaslu berperan penting dalam menjamin kemaslahatan umat yang sesuai dengan kaidah fiqih siyasah.

Kata kunci : Kinerja, Bawaslu, *Money Politic*, Fiqih Siyasah



KATA PENGANTAR

Alhamdhuillillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat, karunia dan hidayahnya penulis diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan, bantuan dan do'a dari berbagai pihak, baik dari keluarga, teman-teman dan dosen pembimbing dalam bentuk materil, moril maupun pemikiran yang berharga dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda M. Dawam dan Ibunda Almh. Siti Fatimah selaku orang tua penulis, yang telah berperan penting dalam mendidik penulis mulai dari kecil hingga sekarang, yang selalu mendoakan penulis dalam meraih cita-cita.
2. Rektor Uin Suska Riau Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag beserta Wakil Rektor I Drs.H.Suryana A Jamrah, Ma., Wakil Rektor II Dr. H. Kusnadi, M.Pd., dan Wakil Rektor III Drs. H. Promadi, Ma., Ph.D, Dan beserta staf Uin Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah Dah Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bapak Dr.H. Hajar M.Ag, beserta Wakil Dekan I Dr. Heri Sunandar, M.Cl, Wakil Dekan II Dr. Wahidin, M.Ag dan Wakil Dekan III Dr. H. Maghfirah, MA yang telah memberikan kemudahan selama penulis melaksanakan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) serta seluruh karyawan dan dosen yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ide dan saran kepada penulis dalam penelitian ini.
6. Ibu Dr. Jumni Nelly, M.Ag selaku penasehat akademis yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau.
7. Bapak/ibu dosen dan seluruh pegawai Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Pimpinan pustaka dan segenap karyawannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Terimakasih kepada anggota Bawaslu Kampar yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Keluarga , Nur Ngafifah, S.pd, Hikmatul Wafiroh, S.Ap, M.Rosihul Aqli, M. Hariri Mustofa, M.Pd, Irma Ulfi Daniati, Fatma Ira Auliawati, abang dan kakak ipar, serta keponakan-keponakan tersayang.
11. Teman-teman jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
12. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman yang banyak membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, Anggia Sucila, Jarwandi Aprianto,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lidya De Vega, Milsa Desva Rahayu, Malisa Utami, Rizky Adinda Putri, Rika Susi Susanti, dan Ratih Zuliani.

13. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis, Alen Setio Cahyo Prayogo, Amelia Eka Handayani, Fadil Rahman Iqbal, Laras Pratiwi, Weni Nurmalita, Yulia Nelfita.

14. Teman-teman KKN Desa Serombau Indah

15. Semua pihak yang telah membantu dan tidak disebutkan stu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah swt membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya robbal'alam.

Pekanbaru, 10 Januari 2021
Penulis

Nanda Ayu Mahbubah
Nim. 11624204241

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	13
B. Tinjauan Umum Bawaslu Kabupaten Kampar	19
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Efektivitas kinerja	27
B. Pengertian <i>money politic</i>	30
C. Tugas Bawaslu Dalam Pencegahan Politik Uang	34
D. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pemilu Dan Money Politic	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kinerja Bawaslu Kabupaten Kampar Dalam Mencegah Praktik Money Politic Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pada Pemilu Legislatif 2019	41
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kinerja Bawaslu Kampar	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan	16
Tabel II.2	Penduduk Kecamatan Menurut Jenis Kelamin	17
Tabel II.3	Agama Di Kabupaten Kampar.....	18
Tabel IV.1	Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	43
Tabel IV. 2	Klasifikasi Pelanggaran Pemilu Pada Masa Kampanye	48
Tabel IV. 3	Klasifikasi Pelanggaran Pemilu Pada Masa Tenang.....	50
Tabel IV.4	Kategori Pelanggan Pemilu	53
Tabel IV. 5	Status Pelanggaran Pemilu.....	54
Tabel IV.6	Laporan pelanggaran pemilu yang tidak dilimpahkan kekejaksaan.....	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



A. Latar Belakang

Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia, sebagaimana sila keempat menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Berarti, yang dikedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandate rakyat. Pandangan ini menggambarkan bahwa demokrasi di Indonesia ini dijalankan melalui mekanisme pemilu (pemilihan umum).¹

Negara Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara. Dalam pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Sudah semestinya, bahwa insan akademis sangatlah wajib dan berhak ikut serta dalam suksesnya kehidupan berdemokrasi dan berpolitik yang sehat demi terealisasinya tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semisal dalam bentuk mencegah kebiasaan-kebiasaan buruk yang notabene telah terlanjur dianggap baik oleh sebagian kalangan. Dengan runtuhnya rezim orde Soeharto yang otoriter pada 21 Mei 1998. Indonesia bergerak menuju sistem politik yang demokratis yang dicirikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum

¹ Yusdiyanto, *Makna Filosofi Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*, Vol.10 Issue 2, 2016, h.259

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang relatif adil, dan adanya ruang yang lebih terbuka bagi warga Negara yang memiliki pandangan politik yang berbeda.²

Pemilihan umum memberikan pengertian bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrument penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan membentuk pemerintahan yang absah serta sebagai sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.³

Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan Negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan system perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy), wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilu (general election) secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi "politikus-politikus" yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan

² Fuad Fachruddin, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 54.

³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Cet. Ke-2), (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).

Pemilihan umum hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran partai politik ditengah masyarakat. Oleh sebab itu adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana kepemimpinan politik secara sah dan damai.⁴

Kajian tentang partai politik senantiasa dihadapkan realita kehidupan organisasi Negara (pemerintah) karena jalan organisasi Negara selalu diwarnai dengan aktifitas politik untuk mengatur kehidupan Negara, proses pencapaian tujuan Negara dan melaksanakan tujuan Negara dengan sebaik-baiknya. Sehingga permasalahan politik sesungguhnya lebih berfokus pada "kekuasaan". Tanpa mengecilkan arti penting dari semangat berdemokrasi masyarakat, berbagai dampak negatif pun muncul seperti cara melalui politik uang (money politic) dan kampanye negatif (negative campaign).⁵

Peristiwa pelanggaran pemilu pada masa kampanye dan masa tenang, salah satunya adalah money politic. Kegiatan money politic yang banyak dilakukan oleh para calon anggota legislatif maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan. Dalam pelaksanaan demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak benar. Money politic kini tidak hanya terjadi dari pusat pemerintahan. Sudah tidak asing lagi, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah

⁴ *Ibid.*,h.61.

⁵ Budianto, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara*,(Jakarta: Erlangga,2000), h.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berani terang-terangan untuk melakukan money politic. Baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima uang "panas", dengan syarat memberikan suaranya pada pemilihan dan pemungutan suara.

Badan pengawas pemilu (bawaslu) sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pemilu juga memiliki tugas untuk mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif, termasuk di dalamnya melakukan akreditasi lembaga pemantauan pemilu.⁶

Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 101 huruf c Bawaslu bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang.⁷ Masih ditemukannya perilaku-perilaku kecurangan yang terjadi disetiap pemilihan umum legislatif. Dengan adanya beberapa calon legislatif atau partai pengusung yang melakukan politik uang (money politic) dengan sasaran utamanya masyarakat dipedesaan.

Menurut pandangan Islam, money politic sangat dilarang dan tidak dibenarkan karena sama halnya dengan *risywah*. Al-Fayumi dalam Al Misbah dan Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat menerangkan bahwa *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan menyembunyikan kebenaran ataupun membenarkan sebuah kebatilan.⁸

Risywah (suap-menyuap) merupakan pemberian dengan cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hal yang

⁶ Bawaslu, *Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019*, (Jakarta:2019), h.2

⁷ Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁸ Abdullah Bin Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta:Gema Insana,2001),h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

diinginkan dengan cara yang tidak benar pula. Maka wajar bila ulama mengharamkan perbuatan ini, sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil dan kehidupan juga tidak jelas. Sebagaimana diketahui bahwasannya, Allah menjelaskan dalam surat al-baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

(١٨٨)

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS.Al-Baqarah:188)⁹

Dari deskripsi di atas tampak bahwa agama melarang adanya money politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun implementasinya terkadang berbeda, karena kondisi sosiopolitiknya. Dan adanya penghambat dalam pencegahan money politic disetiap pemilihan umum. Ini menjadi tugas Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pencegahan dan meminimalisir terjadinya money politic di wilayah Kabupaten Kampar.

Ada beberapa kegiatan politik uang yang diterima Bawaslu Kampar berdasarkan temuan dan laporan dari masyarakat. Ini merupakan penyimpangan dalam dunia politik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Pt. Cordoba Internasional Indonesia , 2012), h.29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suara terbanyak dalam pemilihan umum.¹⁰ Sebanyak 15 laporan dan temuan terkait dugaan pelanggaran dalam pemilihan umum, tidak luput adanya praktik *money politic* yang memenuhi kriteria pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kampar. Pelanggar-pelanggar tersebut merupakan caleg DPRD Kampar, DPRD Riau dan DPR RI. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislatif kabupaten Kampar dari partai-partai pengusung. Beberapa pelanggaran *money politic* terjadi diwilayah pemilihan 4 (empat) kabupaten Kampar oleh partai H dengan membagikan sembako di kecamatan Kampar dan dari partai P di wilayah daerah pemilihan 3 (tiga) dengan membagikan sembako yang didalamnya terdapat kartu nama caleg, dari partai G pelanggaran dilakukan oleh caleg DPRD . Kasus tersebut langsung ditangani oleh Bawaslu dan Gakkumdu.

Latar belakang ini membuat penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut masalah peran bawaslu dalam pemilu tersebut, yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: **"Kinerja Bawaslu Kampar Dalam Mencegah Praktik *Money Politic* Menurut UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Legislatif 2019 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah"**.

¹⁰[Http://Www.Tribunpekanbaru/Pelanggaran-Politik-Uang-Di-Kampar](http://Www.Tribunpekanbaru/Pelanggaran-Politik-Uang-Di-Kampar).Akses Tanggal 20 Oktober 2019

Batasan Masalah

Menghindari adanya kesalahpahaman dalam penelitian ini maka perlu adanya batasan masalah, penulis fokuskan terhadap pencegahan praktik politik uang pada pemilu legislatif 2019 dengan menilai efektivitas kinerja Bawaslu Kabupaten kampar.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Bawaslu Kampar dalam mencegah praktik money politic menurut UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja Bawaslu Kampar?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas kinerja Bawaslu dalam mencegah praktek money politic menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pemilu legislatif 2019.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Bawaslu Kabupaten Kampar dalam mencegah praktek money politic menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pemilu legislatif 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Manfaat penelitian

- a. Menambah wawasan penulis dalam memahami kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pemilihan umum, dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian dan penulisan dalam suatu karya ilmiah.
- b. Memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan hukum tata Negara (siyasah) pada fakultas syariah dan hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (empiris) yang menjelaskan dan melihat hukum sebagai landasan dari efektifitas kinerja Bawaslu Kabupaten Kampar dalam mencegah praktek money politic menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pemilu legislatif 2019. Dengan cara melakukan survei langsung lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai data sekunder yang didapat dari responden melaui wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka sebagai bahan dalam melakukan penelitian ini.¹¹

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Badan pengawas pemilu Kabupaten Kampar. Wilayah ini

¹¹ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.42

mudah dijangkau oleh penulis untuk mengambil data dan melakukan wawancara mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan responden sebagai subjek penelitian dengan ciri yang sama dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.¹² Jumlah populasi 30 anggota Bawaslu Kampar. Karena jumlah populasi yang sedikit, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan perposive sampling. Penulis mengambil 2 orang anggota Divisi Bawaslu Kampar sebagai sampel sesuai dengan masalah yang dibahas.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari instansi tempat dilakukannya penelitian. Data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam hal ini adalah observasi secara langsung di lokasi penelitian, wawancara dengan perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Kampar dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang mendukung serta melengkapi data primer. Data pendukung tersebut melalui studi kepustakaan yaitu

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini UUD 1945, UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

5. Teknik Pengumpulan Data

- Observasi adalah kegiatan untuk mengamati situasi dengan pencatatan yang sistematis mengenai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan diteliti.¹³
- Wawancara adalah proses Tanya jawab secara lisan kepada responden. Proses Tanya jawab ini untuk memperoleh penjelasan, pembuktian dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang permasalahan yang ada.¹⁴ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada anggota Divisi Bawaslu Kampar.
- Dokumentasi adalah pengumpulan data menggunakan barang-barang dalam bentuk tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, jurnal, peraturan, undang-undang dan lain sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga tersimpulkan masalah yang ada untuk dianalisis dan

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), h.151

¹⁴ Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah (Edisi, Ke-1)*, (Jakarta: Kencana, 2011).h.138.

mendapatkan cara penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

7. Metode penulisan

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek berdasarkan penelitian dari fakta-fakta yang ada.
- b. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data yang berhubungan dengan penelitian, kemudian dianalisa serta diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu dengan mengambil teori-teori yang ada kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini agar memudahkan dalam mempelajari serta memahami isi dan tulisan ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, analisis data dan sistematika penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang kabupaten Kampar yang meliputi sejarah singkat, visi dan misi, letak geografis dan demografis,

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan beragama, pendidikan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, mengenai sejarah berdirinya, tugas, wewenang dan kewajiban dalam pelaksanaan pemilihan umum, struktur anggota Bawaslu.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisikan tinjauan tentang pemilihan umum meliputi pengertian efektivitas kinerja, pengertian politik uang, Bawaslu, tugas Bawaslu dalam pencegahan politik uang, perspektif fiqh siyasah terhadap pemilu dan money politic.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian upaya bawaslu kampar dalam mencegah praktik *money politic*, kinerja Bawaslu Kampar dalam mencegah praktek money politic menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Kampar dan dalam perspektif fiqh siyasah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini sebagai penutup dalam pembahsan penelitian ini maka penulis akan menguraikan kesimpulan yang diambil dari bab-bab sebelumnya dan mengemukakan saran-saran dalam usaha menyelesaikan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Berdasarkan surat keputusan Gubernur militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, Kabupaten kampar merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengarayan, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota dengan ibu kota pekanbaru. Pada tanggal 1 januari 1950 ditunjuklah datuk Wan abdul rahman sebagai bupati kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan pemerintah republik indonesia hasil konferensi meja bundar.¹⁶

Kemudian pada tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari lahir kabupaten kampar. Hal ini sesuai dengan ketetapan gubernur sumatera tengah No.:3/dc/stg/50 tentang penetapan kabupaten kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 februari 1950 tersebut kabupaten kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan pemerintahan yang sah. Serta dikukuhkan undang-undang no. 12 tahun 1956 tentang pembentukan otonomi daerah kabupaten kampar dan lingkungan daerah provinsi sumatera tengah.

¹⁶ Kominfo pemerintah kabupaten kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tanggal 6 februari 1950, ditetapkan sebagai hari jadi kabupaten kampar yang setiap tahun diperingati. Penetapan hari jadi ini berdasarkan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II kampar No:02 tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II kampar. Pengesahan dilaksanakan oleh gubernur kepala daerah tingkat I Riau No:kpts.06/11/1999 tanggal 4 Februari 1999. Serta diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten daerah tingkat II kabupaten kampar tahun 1999 No: 01 tanggal 5 februari 1999.

2. Visi-Misi Kabupaten Kampar

1) Visi

Mewujudkan kabupaten kampar negeri berbudaya, berdaya dalam lingkungan masyarakat agamis 2025

Makna yang terkandung dalam visi ini adalah seluruh komponen kabupaten kampar berkomitmen untuk menjadikan masyarakat yang berbudaya, dimana segala perilaku seluruh komponen masyarakat haruslah berlandaskan pemikiran logis yang berakal budi, dan menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang dianut dan berlaku dalam masyarakat kabupaten kampar.

Seluruh komponen kabupaten kampar memiliki kesungguhan hati untuk menjadikan masyarakat yang berdaya, yaitu dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan guna menjadikan dirinya pesaing yang tangguh menghadapi persaingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

global dan terpenuhinya kebutuhan manusia yang layak serta diperlakukan secara adil.

Seluruh komponen kabupaten kampar bertekad untuk menjadikan masyarakat yang agamis, dimana dalam segala aspek kehidupan yang dijalankan selalu dilandasi nilai-nilai keagamaan, dengan harapan kabupaten kampar menjadi serambi mekah di provinsi riau.

2) Misi

1. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kabupaten Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.
2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan kedepan.
4. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait anatar swasta, masyarakat, dan pemerintah baik berskala lokal, regional, nasional maupun internasional.
5. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan.

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta taat terhadap aturan yang berlaku menuju masyarakat agamis yang tercermin dalam kerukunan hidup beragama.

3. Letak Geografis Dan Demografis

Kabupaten kampar sebagai salah satu kabupaten yang berada di provinsi Riau. dengan luas lebih kurang 11.289,28 km dengan luas lebih kurang 211.289,28 km dengan luas lebih kurang 211.289,28 km². Yang terletak antara 01°00'40" lintang utara sampai 00°27'00" lintang selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" bujur timur.

Daftar Tabel II. 1

Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah	
			Ha	(%)
1	Kampar Kiri	Lipat Kain	915,33	8,11
2	Kampar Kiri Hulu	Gema	1.30,25	11,53
3	Kampar Kiri Hilir	Sungai Pagar	759,74	6,73
4	Kampar Kiri Tengah	Simanliyang	330,59	2,93
5	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan	597,97	5,30
6	XII Koto Kampar	Batu Bersurat	752,40	5,49
7	Koto Kampar Hulu	Tanjung	674,00	5,97
8	Bangkinang Barat	Kuok	154,11	1,34
9	Salo	Salo	207,83	1,54
10	Tapung	Petapahan	1.365,97	12,10
11	Tapung Hulu	Senama Nenek	1.169,15	10,36
12	Tapung Hilir	Kota Garo	1.013,56	5,98
13	Bangkinang	Bangkinang	177,18	1,57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14	Bangkinang Seberang	Muara Uwai	253,50	2,25
15	Kampar	Air Tiris	136,25	1,21
16	Kampar Timur	Kampar	173,08	1,53
17	Rumbio Jaya	Teratak	76,92	0,68
18	Kampar Utara	Sawah	79,84	0,71
19	Tambang	Tambang	371,94	3,29
20	Siak Hulu	Pangkalan Baru	689,00	0,11
21	Perhentian Raja	Perhentian Raja	111,54	0,89
Jumlah			11.289,28	100,00

Disdukpencaipil Kabupaten Kampar, sumber data: DKB PDAK PUSAT

Adapun batas-batas wilayah kabupaten kampar sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan kota Pekanbaru dan kabupaten Siak.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Kuantan Singingi.
- c) Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Rokan Hulu dan provinsi Sumatera Barat.
- d) Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Pelalawan dan kabupaten Siak.

4. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar mencapai 742.049 jiwa pada Tahun 2017.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Tabel II.2
Penduduk Kecamatan Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Jumlah	Kelamin	Penduduk
		Laki-laki	perempuan	
1	Bangkinang Kota	17.327	17.051	34.378
2	Kampar	23.107	22.468	45.575
3	Tambang	32.587	30.783	63.370
4	XII Koto Kampar	11.388	10.759	22.147
5	Kuok	11.674	11.251	22.925
6	Siak Hulu	39.491	37.165	76.654
7	Kampar Kiri	14.585	13.471	28.056
8	Kampar Kiri Hilir	5.686	5.306	10.992
9	Kampar Kiri Hulu	5.252	4.902	10.154
10	Tapung	43.784	40.256	84.046
11	Tapung Hilir	27.562	25.596	53.157
12	Tapung Hulu	43.375	39.790	83.165
13	Salo	12.487	11.689	24.156
14	Rumbio Jaya	8.728	8.303	17.031
15	Bangkinang	16.996	16.255	33.251
16	Perhentian Raja	10.250	9.458	19.708
17	Kampar Timur	12.298	11.662	23.960
18	Kampar Utara	9.274	8.907	18.181
19	Kampar Kiri Tengah	14.799	13.529	28.328
20	Gunung Sahilan	11.599	10.703	22.302
21	Koto Kampar Hulu	10.507	10.006	20.513
	KAB. KAMPAR	382.756	359.293	742.049

Disdukpencapil Kabupaten Kampar, sumber data: DKB PDAK PUSAT

5. Kahidupan Agama

Penduduk kabupaten kampar mayoritas beragama islam, diikuti oleh agama protestan, katolik, budha, dan hindu. Jumlah pemeluk agama yang paling banyak adalah pemeluk agama islam yang jumlahnya hampir 90% dari total pemeluk agama di seluruh wilayah kabupaten kampar. Pemeluk agama kristen yang terbanyak kedua yakni sebanyak 8,6%, dan sisanya pemeluk agama budha dan hindu.

Daftar Tabel II.3
Agama Di Kabupaten Kampar

No	Agama	Jenis Kelamin		Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Islam	338,119	318,581	656,700
2	Kristen	40,529	36,875	77,404
3	Khatolik	3,908	3,631	7,539
4	Hindu	34	27	61
5	Budha	158	172	330
6	Khonghucu	-	1	1
7	Kepercayaan	8	6	14
-	Jumlah	382,756	359,293	742,049

Disdukpencapil Kabupaten Kampar, sumber data: DKB PDAK PUSAT

B. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Kampar

1. Sejarah singkat Bawaslu Kabupaten Kampar

Badan pengawas pemilihan umum atau lebih sering dikenal dengan BAWASLU. Lembaga pengawas pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan. Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.¹⁷

Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu tahun 1982, dengan nama panitia pengawas pelaksanaan pemilu (panwaslak pemilu). Pada saat itu sudah muncul distrust terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan panwaslak pemilu pada tahun 1982 dilatari oleh protes-protes atas

¹⁷ Koordinator divisi data dan informasi Bawaslu Kampar

banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu tahun 1971. Karena pemerintahan dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI.

Lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari panwaslak pemilu menjadi panitia pengawas pemilu (panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan pengawas pemilu baru dilakukan melalui UU No 12 Tahun 2003. Menurut undang-undang ini dalam pelaksanaan pengawas pemilu dibentuk sebuah lembaga ad hoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari panitia pengawas pemilu, panitia pengawas pemilu provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu kecamatan.

Penguatan terhadap lembaga ini kembali terjadi dari lembaga ad hoc menjadi lembaga tetap melalui undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU). Sampai pada keputusan mahkamah konstitusi atas judicial review (JR), yang dilakukan Bawaslu atas UU Nomor 22 Tahun 2007 itu yang memutuskan kewenangan pengawas pemilu sepenuhnya menjadi wewenang Bawaslu, begitu juga dengan merekrut pengawas pemilu yang menjadi tanggung jawab Bawaslu.

Berdasarkan undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, secara kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat provinsi dengan nama Bawaslu provinsi. Berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Panwaslu tingkat Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota. Dan pada tanggal 15 Agustus 2018 Panwaslu Tingkat Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota, tanpa terkecuali Kabupaten Kampar yang sebelumnya Panwaslu Kabupaten Kampar berubah menjadi Bawaslu Kabupaten Kampar.

2. Tugas Bawaslu Kabupaten

Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu¹⁸:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. Pelanggaran pemilu; dan
 2. Sengketa proses pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan terhadap penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;

¹⁸ Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
5. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan;
11. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Bawaslu Kabupaten

Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki wewenang, yaitu¹⁹:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;

¹⁹ Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawas di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- g. Membentuk Panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi;
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

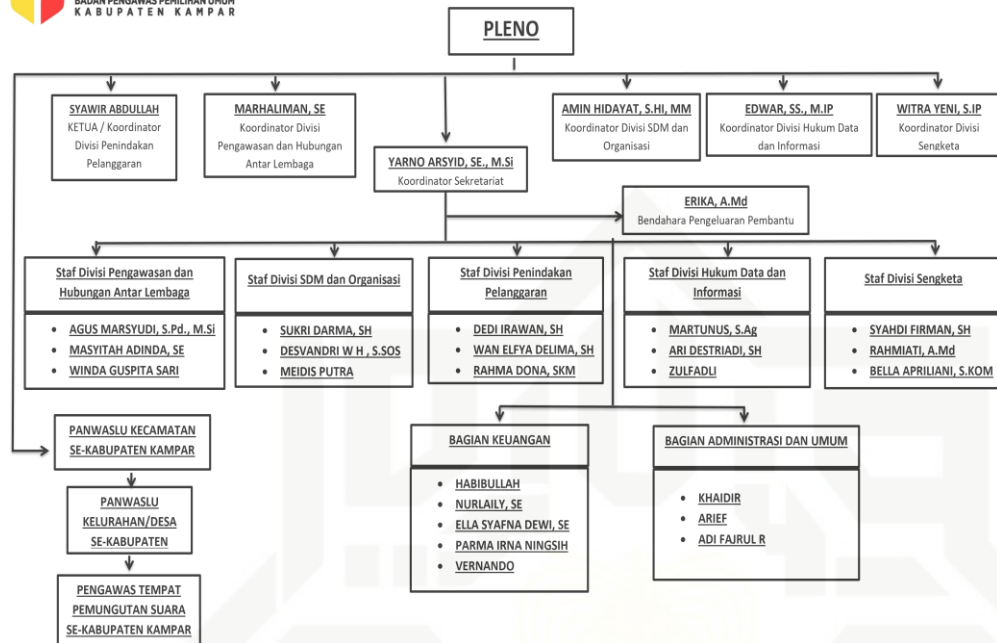
4. Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewajiban, yaitu²⁰:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawas kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif;
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁰ Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

5. Struktur Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai tujuan organisasi, tercapainya kinerja tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi.²¹

Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik yaitu:

1. Produktifitas

Konsep produktifitas ini mengukur efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan. Konsep produktifitas telah berkembang yang berorientasi pada hasil dari kerja aktif yang dikembangkan oleh general accounting yang dikenal dalam input dan output.²²

2. Kualitas layanan

Kualitas layanan ini memberikan pelayanan yang baik oleh organisasi terhadap masyarakat atau publik. Banyak pandangan negatif terhadap masyarakat mengenai organisasi dalam ketidakpuasan pelayanan, sehingga kepuasan terhadap masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja organisasi.

²¹ Pasalog Harbani, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung:2016). h.175

²² *Ibid.*, h.178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Responsibilitas

Konsep responsibilitas menjelaskan terhadap implementasi dari kegiatan organisasi yang sesuai terhadap prinsip-prinsip administrasi maupun sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang dimiliki organisasi.

4. Responsivitas

Konsep responsivitas yang menjelaskan organisasi dapat merespon secara aktif dan langsung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadikan suatu prioritas pelayanan secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi menjalankan visi dan tujuannya.

5. Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas bagaimana kebijakan dan kegiatan organisasi publik di anggap sesuai apabila telah menekuni nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja terdiri dari:

1. Faktor internal²³

- Tujuan organisasi, yaitu capaian yang diinginkan oleh organisasi
- Struktur organisasi
- Sumber daya manusia, yaitu kualitas dari anggota organisasi
- Budaya organisasi, yaitu identitas organisasi menjadi citra organisasi.

2. Faktor Eksternal

- Faktor politik, yaitu yang berhubungan dengan adanya kekuasaan organisasi untuk dapat bekerja secara maksimal.

²³ Sembiring, *Budaya Dan Kinerja Organisasi*, (Bandung: 2012,fokusmedia)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Faktor ekonomi, yaitu perkembangan ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan masyarakat dalam kesejahteraan dalam daya beli suatu masyarakat
- c. Faktor sosial, yaitu yang berorientasi pada nilai yang ada di dalam masyarakat sehingga dapat mempengaruhi pandangan etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.

Supaya dapat menjamin suatu keberhasilan usaha dalam meningkatkan efektivitas kerja karyawan dalam suatu organisasi perlunya pengaruh dari struktur organisasi sehingga dapat menimbulkan kualitas kerja, pemanfaatan waktu, dan peningkatan sumberdaya manusia. Beberapa indikator efektivitas kerja, ialah:

1) Kuantitas kerja

Kualitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan dibawah kondisi normal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja dan keadaan yang didapat atau dialaminya selama bekerja. Setiap perusahaan selalu berusaha supaya efektivitas kerja dari karyawannya dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, suatu perusahaan selalu berusaha agar setiap karyawannya memiliki moral kerja yang tinggi.

2) Kualitas kerja

Kualitas kerja merupakan sikap yang ditunjukkan oleh karyawan berupa hasil kerja dalam bentuk kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan didalam mengerjakan pekerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) **Pemanfaatan waktu**

Setiap karyawan harus dapat menggunakan waktu seefisien mungkin, terutama dengan cara datang tepat waktu ke kantor dan berusaha untuk menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dengan memanfaatkan waktu selama penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

4) **Peningkatan kualitas sumberdaya manusia**

Diperlukan guna mewujudkan hasil yang diharapkan oleh setiap perusahaan. Setiap karyawan sudah sepatutnya diarahkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja mereka melalui berbagai tahapan usaha secara maksimal. Sehingga dengan demikian pemanfaatan sumber daya manusia akan lebih berpotensi dan lebih mendukung keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan.

B. Money Politic (Politik Uang)

1. Pengertian Money Politic (Politik Uang)

Secara etimologi, money politic (politik uang) adalah suap, arti suap yang dimaksud dalam kamus besar bahasa indonesia adalah uang sogok.²⁴ Politik uang diartikan sebagai pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/kelompok ataupun partai.

Fenomena politik uang (money politic) dengan menggunakan uang sebagai alat untuk mempengaruhi keputusan tertentu. Dengan adanya politik

²⁴ Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa indonesia, (jakarta: balai pustaka, edisi kedua, 1994),h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealitas mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak pemberi uang. Adapun yang mengartikan politik uang (money politic) sebagai suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli pada suatu proses politik dan kekuasaan dengan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai politik untuk mempengaruhi suara pemilih (voters).²⁵

Politik uang yang dilaksanakan dalam pemilihan umum merupakan upaya untuk mempengaruhi putusan para pemilih agar menentukan pilihannya pada kontestan tertentu dengan memberikan sesuatu dalam bentuk janji, imbalan atau pemberian materi agar orang yang bersangkutan dalam pemilihan umum memilih peserta tertentu, memilih partai politik peserta tertentu atau memilih pasangan calon tertentu. Politik uang tergolong ke dalam modus korupsi pemilu. Terdapat empat model korupsi pemilu yang berhubungan dengan politik uang, yaitu beli suara (vote buying), beli kandidat (candidacy buying), manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (administrative electoral corruption).²⁶

²⁵ Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*, (Bandung: mandar maju, 2007) h.4

²⁶ Kompas, 11 februari 2005 dalam Elza Faiz, “Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden Dan Pemilihan Kepala Daerah”. Pusat studi konstitusi FH UII Yogyakarta, t.t. diakses tanggal 1 juli 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Bentuk-Bentuk Money Politic (Politik Uang)

Berikut adalah bentuk-bentuk money politik, yaitu:

a. Berbentuk uang (cash money)

Didalam lingkungan masyarakat, uang diakui sebagai senjata politik paling ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudaranya kekuasaan. Uang juga sebagai faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai saran, termasuk uang.²⁷

Dalam pemilihan umum, uang sangat berperan penting. Modus money politic yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

- a) Kampanye. Dengan cara meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker, dan kaos. Setelah selesai acara para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
- b) Dalam pemilu ada beberapa praktik tindakan money politic misalnya distribusi sumbangan politik, yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Contoh

²⁷ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, Dan Hutang Piutang* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2001). h.95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nyata dari sembako politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya masyarakat yang berke ekonomi rendah.

b. Berbentuk fasilitas umum

Fasilitas dan sarana umum sebagai politik pencitraan dengan tebar pesona melalui “jariah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrumen yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat yang biasa dijadikan jariah politis, yaitu: pembangunan masjid, mushalla, madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang) dan sebagainya.

3. Strategi money politic

Strategi-strategi money politic saat pemilihan umum, sebagai berikut:

a. Serangan fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai wakil-wakil rakyat di parlemen. Serangan fajar umumnya menasar pada kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang terjadinya pelaksanaan pemilihan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Mobilisasi masa

Mobilisasi masa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan masa dengan iming-iming sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang dilakukan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang saat kampanye akan memilihnya saat pemungutan suara.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Money Politic

Pengaruh terjadinya praktek money politic (politik uang), yaitu peserta pemilu (calon anggota legislatif) dan masyarakat sebagai pemilih. Salah satu alasan mengapa para caleg melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan caleg lain. Caleng yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik uang. Para caleg yang pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulang hal yang sama.²⁸

C. Tugas Bawaslu Dalam Pencegahan Politik Uang

Berdasarkan undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 101 huruf c, bahwa bawaslu bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota. Banyak upaya yang dilakukan Bawaslu,

²⁸ Anas Azwar, *kiai, money politic dan pragmatisme politik*, (jurnal agama dan hak asasi manusia, 2016), vol.5, h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menghimbau semua kalangan dan lapisan masyarakat, memberikan sosialisasi tentang pelanggaran-pelanggran politik uang yang sering terjadi saat dilakukannya pemilihan umum.

Upaya pencegahan ini dilakukan selama beberapa hari sebelum pemilihan berlangsung. Tetapi keadaan dilapangan tidak menutup kemungkinan juga masih terjadi pelanggaran dengan berbagai alasan yang disampaikan. Bawaslu menegaskan bahwa mereka hanya hanya mengawasi sehingga memang benar-benar mengajak masyarakat peserta pemilu sama-sama mengawal pesta demokrasi di Indonesia khususnya di Kampar dapat berjalan dengan baik dan sejalan dengan peraturan yang ada.²⁹

Antisipasi terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) bekerjasama dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK). Hal ini bertujuan untuk membantu mengawasi kegiatan politik transaksional, politik uang terhadap pemilih, dan dana kampanye. Kerjasama antara KPK dan Bawaslu ini hanya dilakukan dalam kegiatan pencegahan korupsi karena KPK memiliki keterbatasan kewenangan. Tidak menutup kemungkinan KPK akan menindaklanjuti laporan Bawaslu jika ada unsur penyelenggaraan negara dalam politik uang menjelang pemilu.

Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) menyiapkan inovasi program pencegahan dan pengawasan pemilu dengan pembentukan kelompok kerja (Pokja) guna mencegah politik uang. Program pencegahan dan pengawasan ini sebagai

²⁹ Fety Fitriana Hertika, *Peran Badan Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu 2019 Di Kabupaten Ponorogo*, Jurmas (2019),h. 94

tindak lanjut dari program patroli pengawasan antipolitik uang yang dilakukan saat minggu tenang dalam pemilihan umum 2019.³⁰

Dalam hal ini Bawaslu berupaya menguatkan fungsi pencegahan politik uang. Program kerja politik uang merupakan forum bersama antara pengawas pemilu dengan tokoh lokal yang berpengaruh di lingkungan sekitar. Dengan tujuan, dapat melakukan tindakan pencegahan kepada oknum-oknum atau kelompok yang berpotensi menjadi pelaku dalam terjadinya politik uang. Bawaslu akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan ketika terbukti jelas sudah melanggar undang-undang yang ada. Seperti pelanggaran politik uang, Bawaslu kabupaten akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam GAKKUMDU (penegak hukum terpadu) pada penyelenggaraan pemilu.

D. Prespektif Fiqih Siyasah Terhadap Pemilu Dan Money Politic

Pemilihan umum dalam sejarah peradaban islam ditemukan dari suatu peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemillihan umum yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilihan umum yang saat ini dipraktekkan. Dalam sejarah islam, pemilihan pemimpin dilakukan dengan Bai'at. Pada masa khulafa al-rasyidin, memilih pemimimpin berbeda metodenya dengan pemilihan umum yang dikenal sekarang. Pemilihan umum pasa masa khulafa al-rasyidin dapat ditemui janji setia (baiat) dilaksanakan

³⁰ [Http://Bawaslu.Go.Id/Id/Berita/Bawaslu-Siapkan-Pokja-Guna-Cegah-Politik-Uang](http://Bawaslu.Go.Id/Id/Berita/Bawaslu-Siapkan-Pokja-Guna-Cegah-Politik-Uang).
Tanggal Akses 8 Oktober 2020, Pukul 20:31 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

di masjid kemudian rakyat memberikan baiat kepada khalifah, sehingga disini ada keterlibatan dan peran rakyat dalam baiat khalifah. Ini menjadi alasan para ulama sekarang terhadap persoalan pemilihan umum, karena memiliki makna mengenai persoalan kedaulatan rakyat, yaitu memberikan pilihannya kepada mereka yang mewakilinya.³¹

Dalam demokrasi barat, pemilihan umum sebagai salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat, sehingga apa pun alasannya agar hak-hak rakyat dapat disalurkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, baik pemilu kepala daerah, legislatif maupun eksekutif dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kedaulatan rakyat yang merupakan suatu praktek ketatanegaraan untuk mengisi jabatan publik.

Negara Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam tentunya harus memahami bagaimana cara memilih pemimpin. Agama Islam (termasuk hukumnya) tidak memberi batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam mempunyai tujuan yang agung yaitu tidak ada kesulitan bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntunan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat. Dalam memilih pemimpin dijelaskan dalam surat Al-Imran:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُ وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٢٨)

³¹ Sodikin, *Pemilihan Umum Dalam Islam*, Ahkam. Vol.XV. 1 Januari 2015, h.62

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Al-Qur'an (3:28).³²

Uraian diatas menjelaskan bahwa, memilih seorang pemimpin haruslah yang beriman kepada Allah SWT. Agar membawa kemaslahatan bagi rakyat dan melaksanakan tugas sesuai syariat.

Ulama memiliki perbedaan pendapat terhadap pemilihan umum, ada dua kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda. Kelompok pertama, yaitu yang mengharamkan pemilihan umum sebagaimana yang dipraktekkan sekarang ini, pendapat ini dikemukakan oleh mahmud syakir, hafizh anwar, al-amin al-hajj. Pendapat mereka seperti:³³

- 1) Pemilu yang dipraktekkan sekarang ini tidak ada dalilnya.
- 2) Pemilu yang diselenggarakan saat ini menimbulkan kerusakan, tidak ada ketakwaan terhadap Allah Swt. Karena adanya penggunaan dana yang besar, jual beli suara, hal ini menimbulkan kemudharatan.
- 3) Aturan demokrasi yang diambil dari dunia barat sehingga merupakan aturan jahiliyah.
- 4) Tujuan pemilu yang tidak mencapai kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat

Kelompok kedua, berpandangan menghalalkan pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini karena masih dalam koridor syariah. Pendapat ini

³² Departemen Agama Ri, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, Pt. Cordoba Internasional

³³ Sodikin, op.cit.63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemukakan oleh mayoritas ulama kontemporer, seperti muhammad rasyid ridho, abu al-a'la al-mawdudi, yusuf al-qardhawi, dan abd al-qadir awdah.

Alasan mereka membolehkan pemilu ialah:

- 1) Inti sebenarnya dari baiat adalah pemberitahuan dari rakyat yang memberikan baiat akan persetujuan dan rida terhadap seseorang yang akan dibaiai, terwujud dengan pemilu sekarang ini.
- 2) Kenyataan dalam sejarah islam dan riwayat islam menunjukkan adanya pemilihan umum.
- 3) Metode pengangkatan kepala negara termasuk dalam kategori ijthadiyah.
- 4) Pemilihan umum merupakan metode aktual yang dapat mengetahui pandangan rakyat secara adil dan obyektif.

Pemilihan umum sebagai salah satu cara bukan satu-satunya cara (ulsub) yang bisa digunakan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pemilu legislatif, ulsub itu digunakan untuk memilih wakil rakyat dengan tugas membuat undang-undang dan harus sesuai dengan ketentuan syariah, tidak berdasarkan suara mayoritas. Dengan demikian, pemilihan umum dalam pandangan islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan.³⁴

Fenomena demokratisasi yang terjadi di indonesia menimbulkan masalah baru dalam bidang sosial, politik dan hukum yakni dengan maraknya politik uang dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum. Dalam syariat, politik

³⁴ Sodikin, op.cit, h.66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang dinilai sebagai perbuatan mempertukarkan Allah dengan sesuatu yang bersifat materi. Hal ini karena tindakan suap merupakan manifestasi ketundukan seseorang pada wujud material selain Allah yang diangkat seolah-olah senilai dengan Allah dan karenanya bertentangan dengan ajaran tauhid, sekaligus bertentangan dengan syariat.³⁵

Praktik politik uang dalam Islam termasuk dalam kategori *risywah*. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki kesamaan yaitu berupa menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi atau orang lain dengan jalan yang batil. Allah melarang untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, yaitu dengan cara melawan hukum Allah dan mencoba menyiasati melalui upaya-upaya tertentu seperti hanya praktik suap-menyuap.

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* politik uang membawa kemudharatan ketimbang sebuah kemaslahatan. Kemudharatannya tentu dilandaskan pada akibat, dampak, ataupun pengaruh politik uang ini bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara secara umum. Larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana telah digariskan dalam syariat baik bagi penyelenggara negara di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif, maupun kepada masyarakat umum tentu karena syariat memandang ada sisi negatif yang ditimbulkan dari perilaku politik uang ini.

³⁵ Didin Saepudin, *Suap Dan Politik Uang Dalam Pandangan Fikih*, Vol. 6 No.2, Desember 2016, h.330

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan telah diuraikan pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pencegahan praktik politik uang, menurut peneliti Bawaslu kampar belum melaksanakan tugasnya secara maksimal. Karena, Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu pada saat kampanye dan masa tenang dalam pemilu legislatif 2019 masih ditemukan pelanggaran praktik politik uang. Dalam melakukan pencegahan pemilu, Bawaslu belum memiliki strategi khusus untuk melakukan sosialisasi politik guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu belum dilakukan menyeluruh ke masyarakat sehingga tidak semua masyarakat tahu dan paham apa saja larangan-larangan dalam pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, Bawaslu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, melakukan Kerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan dengan membentuk sentra Gakkumdu.
2. Berdasarkan tinjauan fiqih siyasah Bawaslu Kampar belum memberikan kenyamanan secara maksimal kepada masyarakat saat pelaksanaan pemilihan umum 2019. Hal ini dikarenakan masih adanya risywah atau suap-menyuap yang dilarang agama, karena dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya suap-menyuap akan menghasilkan sumberdaya manusia yang tidak berkualitas untuk menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin negara. Hal ini dipengaruhi kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan di setiap desa oleh anggota Bawaslu Kampar dikarenakan jumlah anggota yang ditugaskan masih sedikit, sehingga pengawasan saat pemilihan umum belum berjalan secara maksimal. Menjamin kemaslahatan masyarakat dalam fiqih siyasah menjadi tugas penting pemerintah ataupun lembaga negara, bertujuan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak Bawaslu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh tentang bahaya praktik politik uang (money politic) menjelang pelaksanaan pemilihan umum.
2. Diharapkan untuk memberikan upaya semaksimal dan seoptimal mungkin dengan menggandeng dan melibatkan berbagai pihak diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang berkomitmen untuk menolak dan melawan politik uang (money politic).
3. Diharapkan dapat membentuk organisasi anti politik uang (money politic) di tiap-tiap desa di Kabupaten Kampar agar masyarakat memahami bahaya dari politik uang dalam setiap dilaksanakannya pemilihan umum.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, Fiqih Siyasah,(Bandung:Pernada Media,2003)
- Abdullah Bin Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*,(Jakarta:Gema Insana,2001)
- Anas Azwar, Kiai,*Money Politic Dan Pragmatisme Politik*, (Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia, 2016), Vol.5
- Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta:Sinar Grafika,2002)
- Bawaslu, *Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019*, (Jakarta:2019)
- Budianto, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara*,(Jakarta: Erlangga,2000)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994)
- Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*, (Bandung: Mandar Maju,2007)
- Fuad Fachruddin, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi*,(Jakarta:Pustaka Alvabet,2006)
- Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, Dan Hutang Piutang*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- [Http://Pekanbaru.Tribunnews.Com/Pelanggaran-Politik-Uang-Dikampar](http://Pekanbaru.Tribunnews.Com/Pelanggaran-Politik-Uang-Dikampar).Akses Tanggal 20 Oktober 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[Http://Www.Pengertianahli.Com/2013/12/Pengertian-Pemilihan-Umum.Html](http://Www.Pengertianahli.Com/2013/12/Pengertian-Pemilihan-Umum.Html)

Akses Tanggal 20 Juli 2020, Pukul 09.44 Wib.

[Https://Pekanbaru.Tribunnews.Com/Amp/2018/12/19/Bawaslu-Kampar-Dalami-](https://Pekanbaru.Tribunnews.Com/Amp/2018/12/19/Bawaslu-Kampar-Dalami-Kasus-Dugaan-Money-Politik-Dengan-Dugaan-Terlapor-Dua-Caleg-Di-Kampar?)

Kasus-Dugaan-Money-Politik-Dengan-Dugaan-Terlapor-Dua-Caleg-Di-Kampar?, Akses Tanggal 20 Oktober 2019

Indra Ismawan, *Money Politic; Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (Cet, Ke-1), (Yogyakarta:Media Presindo, 1999)

Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi,Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah* (Edisi, Ke-1,(Jakarta:Kencana, 2011)

Kompas, 11 Februari 2005 Dalam Elza Faiz, “*Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden Dan Pemilihan Kepala Daerah*”. Pusat Studi Konstitusi FH UII Yogyakarta,T.T. Diakses Tanggal 1 Juli 2020

Mizan, *Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA), Bogor:2013, Vol 1 No.2

Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Cet, Ke-2), (Jakarta: Rajawali Press,2009)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, Madania Vol. XVIII, No. 1 tahun 2014

Sodikin, *Pemilihan Umum Dalam Islam*, Ahkam.

Sri Hastuti, *Pemilu Dan Demokrasi,Jurnal Hukum*,Vol.11,2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Alphabets,2014)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Yusdiyanto, *Makna Filosofi Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*, Vol.10 Issue 2,2016



UIN SUSKA RIAU

Dokumentasi penelitian wawancara di kantor Bawaslu Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul *KINERJA BAWASLU KABUPATEN KAMPAR DALAM MENCEGAH PRKTIK MONEY PLITIC MENURUT UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH*, yang ditulis oleh :

Nama : **NANDA AYU MAHBUBAH**
 NIM : 11624204241
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 4 Januari 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Dalam jaringan (online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Januari 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Basir, S.H.I., MH

Penguji I
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Penguji II
Haswir, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

JALINUS, S.Ag
NIP. 197508011023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

ite Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5251/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: NANDA AYU MABHUBAH
NIM	: 11624204241
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: BAWASLU Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Efektivitas bawaslu kabupaten kampar dalam mencegah praktik money politic menurut
undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pemilu legislatif 2019 dalam
perspektif fikih siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/34690
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syarifah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5251/2020 Tanggal 18 Agustus 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

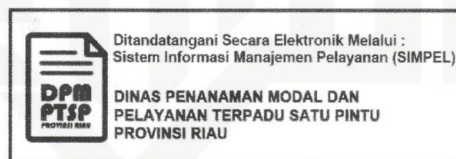
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NANDA AYU MABHUBAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11624204241 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | EFEKTIVITAS BAWASLU KABUPATEN KAMPAR DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONEY POLITIC MENURUT UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BAWASLU KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Agustus 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syarifah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrandas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : NANDA AYU MAHBUBAH
NIM : 11624204241
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
JUDUL : KINERJA BAWASLU KAMPAR DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONEY POLITIC MENURUT UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Pembimbing: Afrizal Ahmad, M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 25 Januari 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL

NIP. 1988 0430 2019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

NANDA AYU MAHBUBAH, lahir di Bangkinang Pada tanggal 19 September 1997. Anak keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan **M Dawam SL** dan **Siti Fatimah**. Penulis pertama kali sekolah di TK Darussalamah Desa Petapahan Jaya dan lulus tahun 2004, kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah dasar di SD Negeri 005 Petapahan Jaya dan lulus tahun

2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah tingkat pertama di SMP Negeri 3 Tapung dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah tingkat menengah di MAN 2 Model Pekanbaru mengambil jurusan IPS dan lulus pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima menjadi mahasiswi jurusan hukum tata negara siyasah di fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau. Pada tanggal 04 januari 2021 penulis dinyatakan lulus.

Berkat petunjuk dan pertolongan ALLAH SWT , usaha dan disertai doa dari orang tua dalam menjalankan aktivitas akademika di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau. Alhamdhulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul **“Kinerja Bawaslu Kabupaten Kampar Dalam Mencegah Praktik Money Politic Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Legislatif 2019 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”**.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.